

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Bertambahnya jumlah penduduk berdampak bertambahnya kebutuhan dan fasilitas publik, antara lain fasilitas kebutuhan sumberdaya listrik. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas publik khususnya listrik, pemerintah membangun pembangkit listrik yaitu PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 M² pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1000 MW di Kab. Batang Prov Jawa Tengah. Pembangunan Pembangkit Listrik tersebut bekerjasama sama dengan pihak swasta yaitu PT BPI (Bhimasena Power Indonesia) yaitu sebagai perusahaan konsorsium yang memenangkan lelang proyek PLTU Batang. Pembangunan PLTU tidak lepas dari alihfungsi lahan. Dalam alihfungsi lahan tersebut pasti menimbulkan permasalahan yang berdampak kepada masyarakat. Dampak tersebut antara lain :

a. Dampak dari suatu kebijakan pada situasi target atau kelompok.

Pembangunan PLTU menimbulkan kontra di masyarakat karena pembangunan PLTU tersebut dibangun di lahan pertanian masyarakat, yang mengharuskan masyarakat mengalihfungsikan lahan mereka untuk proyek. PLTU yang membutuhkan lahan 226 ha. Adapun lahan tersebut termasuk

lahan pertanian produktif di masyarakat dan mayoritas masyarakat lahan tersebut adalah lahan mata pencaharian utama masyarakat. Proyek tersebut tidak hanya memanfaatkan lahan pertanian masyarakat saja melainkan juga mempengaruhi mata pencaharian penduduk yang mana masyarakat mayoritas bermatapencaharian buruh tani di lahan tersebut. Banyaknya protes dan demo yang dilakukan masyarakat pada awal penetapan proyek, PT BPI memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak yaitu diberikannya lahan pengganti yang terletak di Desa Segayung dengan luas 32 Ha dan masing-masing orang mendapatkan 1200m. Tetapi tidak semua masyarakat terkena dampak dapat menerima lahan pengganti, hal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan pengganti. Hanya sebagian orang yang mendapatkan pengganti lahan tersebut, lahan pengganti tersebut ditanami dengan tanaman kacang tanah dan padi. Jarak tempuh lahan pengganti di Segayung dengan Desa tempat mereka tinggal jaraknya sangat jauh dan harus menggunakan kendaraan, dan tanah di sana tidak subur seperti lahan sebelumnya. Oleh karena itu sangat berpengaruh dengan hasil panen yang kurang baik, lahan dulu adalah lahan yang sangat subur dan produktif hasil panennya pun baik di lahan sebelumnya. Masyarakat juga diberi kompensasi berupa uang oleh PT dengan jumlah 250-350 perbulan selama 16 kali, kompensasi uang tersebut untuk menghidupi keluarga sehari-hari terbilang sangat kurang yang dulunya masyarakat bisa mendapatkan 20-35rb perhari sekarang masyarakat banyak yang menganggur.

b. Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan atau kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan

Pembangunan PLTU bekerja sama dengan pemerintah swasta tersebut belum terlepas dari permasalahan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mana lahan tersebut adalah mata pencaharian utama masyarakat. Proyek tersebut memaksa masyarakat untuk beralih profesi yaitu pengangguran. Bagi masyarakat perempuan yang dulunya mereka bekerja sebagai buruh melati di lahan power blok sekarang mereka menjalankan tugasnya menjadi ibu rumah tangga, dampak proyek pun juga dirasakan masyarakat pedagang yang biasanya setiap hari dijumpai banyak petani berkunjung setelah lahan tersebut depower blok lingkungan sekitar menjadi sepi dan pedagang juga mengalami penurunan pendapatan. Begitupun masyarakat supir angkutan juga mengalami dampak yang sama. Proyek tersebut juga membuka peluang untuk masyarakat membuka usaha kuliner, kebanyakan yang membuka usaha kuliner dari masyarakat luar Kabupaten Batang dan mereka menyewa lahan untuk membangun tempat makan., sedangkan masyarakat lokal banyak membuka penginapan karena banyak masyarakat perantauan yang bekerja di proyek PLTU

c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan sekarang dan keadaan dimasa yang akan datang.

Pembangunan PLTU Batang menambah tingkat pengangguran dan kemiskinan di Desa Karanggeneng. Masyarakat harus dapat beradaptasi dengan keadaan sekarang ataupun nanti di masa depan. Untuk membantu perekonomian masyarakat PT BPI membuka lapangan pekerjaan di proyek PLTU untuk masyarakat sekitar pembangunan PLTU. Tidak hanya penduduk asli daerah, bahkan banyak penduduk perantauan yang bekerja di PLTU. Tetapi mayoritas masyarakat asli daerah tidak mempunyai skill dalam pembangunan sedangkan PT BPI membutuhkan masyarakat yang berskill dalam proyek.

d. Evaluasi juga menyangkut sumber lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan publik.

Bentuk tanggung jawab dari BPI yang lain yaitu pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama). Untuk menjalankan KUB tersebut PT BPI memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dan BPI pun memberikan modal dan sarana untuk usaha masyarakat. Tetapi kenyataannya bantuan KUB tersebut hanya bertahan 1-2 tahun saja karena masyarakatnya yang kurang telaten juga masyarakat yang tidak tahu dengan dunia wirausaha.

e. Biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan.

Adanya proyek tersebut masyarakat tidak ingin dirugikan, karena di lapangan masyarakat banyak yang dirugikan dengan kebijakan tersebut. Pembangunan proyek ini masih dalam rekonstruksi, tetapi masih ada masyarakat yang mengabaikan pemberian kompensasi lahan karena masyarakat bersikeras tidak ingin lahan tersebut dialihfungsikan dan uang kompensasi lahan sekarang ini dititipkan di Pengadilan Negeri Batang.

5.2 SARAN

Dari penjelasan kesimpulan diatas maka dapat diambil saran :

- a. Pembangunan dari suatu kebijakan pada arget atau kelompok.

Pembangunan proyek PLTU memanfaatkan lahan pertanian masyarakat yang berdampak masyarakat kehilangan lahan, matapencaharian dan pendapatan menurun. Adanya masalah tersebut seharusnya pemerintah mencermati dengan benar permasalahan yang di masyarakat karena itu menyangkut juga masa depan masyarakat. Masyarakat yang kehilangan lahan, seharusnya pemerintah mencari lahan pengganti yang layak bagi masyarakat dan sesuai dengan lahan sebelumnya serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak PLTU. Harga tanah yang ditawarkan pun harus dapat menguntungkan bagi masyarakat karena lahan tersebut seharusnya dapat menjadi asset masa depan. Pembangunan proyek tersebut juga mempengaruhi pendapatan masyarakat petani yang kehilangan lahan, buruh tani yang kehilangan pekerjaan, pedagang yang

sebelumnya rame pembeli dan buruh angkut untuk mengangkut hasil panen dulunya. Alihfungsi lahan mengharuskan masyarakat untuk beralih profesi menjadi pengangguran, untuk mengurangi jumlah pengangguran pemerintah seharusnya memikirkan keadaan masyarakat yang dulunya setiap hari bekerja, setelah dibangunnya PLTU mereka menganggur. Pemerintah perlu memikirkan pengganti mata pencaharian sebelumnya dengan cara membuka lapangan pekerjaan atau dengan memberikan pelatihan berwirausaha, bagi masyarakat terdampak khususnya untuk perempuan dan masyarakat yang berusia lanjut.

- b. Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan atau kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.

Pembangunan PLTU Batang memunculkan dampak yang besar bagi masyarakat di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Dampak tersebut dapat ditanggulangi dengan cara pemerintah memberikan perhatian khusus untuk masyarakat yang terkena dampak PLTU, karena banyak masyarakat yang menganggur terutama perempuan. Lahan tersebut merupakan pendapatan utama masyarakat. Pemerintah seharusnya cepat bertindak untuk memberikan bantuan modal dan pelatihan-pelatihan sampai masyarakat mampu untuk berdiri sendiri, karena dengan hal tersebut masyarakat setidaknya bisa menghidupi keluarga dan bisa menabung untuk biaya sekolah anak. Lapangan pekerjaan baru sangat penting untuk masyarakat agar dapat mengganti pekerjaan sebelumnya dan menjamin kehidupan di masa depan.

- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak keadaan sekarang dan keadaan dimasa yang akan datang. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak bagi masyarakat yang terkena proyek baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya penduduk asli Kabupaten Batang yang mana masih banyak masyarakat yang terkena dampak berpendidikan rendah atau tidak memiliki skill sehingga mereka yang berpendidikan rendah atau tidak memiliki skill tertentu tidak dapat menjadi tenaga kerja PLTU akhirnya mereka menjadi pengangguran. Sedangkan masyarakat hendak mau membuka diri dengan keberadaan PLTU dan melihat secara luas tentang didirikannya PLTU di Kabupaten Batang. Pendirian PLTU tidak hanya ditujukan masyarakat Batang melainkan masyarakat secara nasional. Hal ini untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia.
- d. PT BPI (Bhimasena Power Indonesia) membentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama). KUB dalam penerapannya tidak berjalan lama hanya 1-2 tahun. Seharusnya ganti rugi yang diterima seharusnya digunakan sebaik mungkin sehingga dapat mengangkat pendapatan dan taraf hidupnya. Dan bahkan uang kompensasi dan KUB dikelola dengan baik yang nantinya dapat bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Masyarakat mayoritas berpendidikan rendah tidak tahu tentang dunia kewirausahaan karena itu pentingnya pemerintah untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat agar wirausaha yang dirintis dapat berjalan lancar hingga menjadi usaha yang dikenal publik.

- e. PLTU masih dalam pembangunan dan masih ada masyarakat yang bersikeras untuk tidak menjual lahannya ke PT BPI. PT BPI menyerahkan uang lahan tersebut kepada Pengadilan Negeri. Saat ini masih ada beberapa masyarakat yang belum mengambilnya. Perlu adanya solusi yang tepat dan baik untuk masyarakat yang belum mengambil uang ganti lahan. Perlu adanya kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat tentang biaya lahan yang masih di pengadilan